BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki fase usia tua yang ditandai dengan penurunan kesehatan fisik maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia mendefinisikan lansia sebagai orang berusia 60 tahun ke atas, batasan yang juga digunakan WHO. BPS memperjelas klasifikasi tersebut menjadi lansia muda (60–69 tahun), lansia madya (70–79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas), yang umumnya diiringi penurunan kemampuan gerak tubuh (Akbar et al. 2021, 392).

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bentuk upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagaimana terdapat pada pasal 9 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

> "(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
> a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi".

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur jaminan kesejahteraan bagi lansia sebatang kara atau terlantar. Sebagaimana terdapat pada pasal 65 ayat (3) yang berbunyi:

> "Dalam hal lansia sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hidup sendiri atau terlantar, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan konsumsi gizi seimbang dan kebutuhan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Aturan ini menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memberikan bantuan sosial untuk kebutuhan gizi seimbang dan kebutuhan lain lansia terlantar. Ketentuan tersebut menjadikan pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengubah kebijakan nasional menjadi program nyata di tingkat kabupaten/kota. PP Nomor 28 Tahun 2024 menjadi landasan yuridis utama kajian peran kelembagaan dalam penanganan lansia terlantar di daerah.

Indonesia sedang menghadapi proses penuaan penduduk (*ageing population*) yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun akibat kemajuan bidang kesehatan dan menurunnya angka kematian. BPS mencatat Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2025 mencapai 74,47 tahun, naik 0,32 tahun dari 2024, menandakan membaiknya layanan kesehatan (Vibriyanti 2019, 2). Peningkatan jumlah lansia yang tidak diimbangi kesiapan sistem perlindungan sosial berpotensi memunculkan persoalan baru, termasuk meningkatnya jumlah lansia terlantar (Puspitasari & Arsiyah 2015, 201).

Persoalan lansia terlantar bersumber dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. Sebagian lansia tidak memiliki keluarga yang merawat, sementara sebagian lain memiliki keluarga namun terkendala ekonomi dan fisik sehingga tidak mampu memberi perawatan layak (Atjil & Saleh 2025, 186), ditambah keterbatasan jangkauan layanan sosial. Penelantaran berdampak pada kondisi psikologis lansia berupa depresi dan rendahnya rasa berharga, sejalan dengan penurunan kesehatan fisik akibat minimnya perawatan medis dan nutris (Situngkir et al.2023, 28).

Pertumbuhan jumlah lansia mengharuskan pemerintah daerah berperan aktif menangani kesejahteraan lansia terlantar, termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 mencatat 4.054 lansia terlantar yang tersebar di 13 kecamatan, terdiri dari 1.216 laki-laki dan 2.838 perempuan. Dinas Sosial berperan memberikan pelayanan langsung kepada kelompok rentan ini, sebagaimana fungsi dinas sosial di berbagai daerah lain yang meliputi bantuan

UIN IMAM BONJOL PADANG

sosial reguler, pelayanan panti, permakanan, alat bantu, dan pembinaan kemandirian (Putri et al. 2026, 271).

Data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 memperlihatkan variasi jumlah lansia terlantar yang signifikan antar-kecamatan. Kecamatan Kapur IX menempati posisi tertinggi dengan 777 orang, disusul Lareh Sago Halaban dengan 605 orang (186 laki-laki, 419 perempuan), kemudian Payakumbuh (476) dan Guguak (384). Sebagai pembanding, Situjuah Limo Nagari (125), Pangkalan Koto Baru (154), Suliki (176), dan Harau (290) memiliki jumlah kasus yang jauh lebih rendah, bahkan Harau kurang dari separuh Lareh Sago Halaban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan keterlantaran lansia tidak tersebar merata, sehingga pemilihan lokasi penelitian yang tepat menjadi krusial.

Kecamatan Kapur IX yang tertinggi memang layak diperhatikan, namun wilayah tersebut relatif lebih sering menjadi rujukan program bantuan, sehingga Lareh Sago Halaban dengan beban hampir setara justru masih minim. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini memilih Nagari Halaban, yang berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, sebagai lokasi penelitian. Alasan utamanya, Kecamatan Lareh Sago Halaban menempati posisi kedua tertinggi se-kabupaten dengan 605 kasus, jauh di atas rata-rata kabupaten yang berkisar 312 kasus per kecamatan, dan Nagari Halaban merupakan salah satu nagari dengan konsentrasi kasus lansia terlantar yang cukup tinggi di kecamatan tersebut sehingga dipilih sebagai unit analisis yang lebih spesifik dan mendalam. Dominasi lansia perempuan terlantar 69 persen dari total kasus juga memperkuat urgensi penelitian karena kelompok ini cenderung menghadapi kerentanan berlapis dalam aspek ekonomi dan kesehatan.

Karakteristik geografis dan administratif Nagari Halaban turut mendukung kelayakannya sebagai lokasi penelitian. Nagari ini terdiri dari 8 jorong dengan wilayah agraris luas, sehingga lansia terlantar tersebar pada jorong-jorong dengan karakteristik sosial-ekonomi beragam. Letaknya yang tidak jauh dari pusat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak memudahkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

pengumpulan data primer dan koordinasi dengan Dinas Sosial. Kombinasi tingginya jumlah kasus, keragaman wilayah, dan kemudahan akses menjadikan Nagari Halaban lokasi yang cocok terkait upaya peningkatan lansia terlantar.

Organisasi kemasyarakatan Islam turut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk Nagari Halaban. Nahdlatul Ulama (NU) berperan melalui santunan sosial, pembinaan keagamaan, dan penggalangan dana (Taufiqurrohman & Hidayat 2025, 817). Keberadaan kader NU hingga tingkat jorong di Nagari Halaban menjadikan wilayah ini strategis untuk melihat sinergi program pemerintah dan inisiatif keagamaan. Sinergi semacam ini penting dikaji karena keberhasilan penanganan lansia terlantar bergantung pada kolaborasi negara, masyarakat sipil, dan komunitas keagamaan.

Wali nagari juga berperan mencegah dan menangani lansia terlantar melalui fungsi pemerintahan nagari yang masih berjalan di jorong-jorong Nagari Halaban. Sebagai pemimpin pemerintahan nagari, wali nagari bersama perangkat nagari menjadi unsur yang menjaga kesejahteraan warga, termasuk lansia (Anggraini 2022, 136). Namun dengan adanya keterbatasan kapasitas dan anggaran pemerintahan nagari akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat, yang melemahkan fungsi perlindungan nagari terhadap warga yang rentan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, negara memiliki tanggung jawab menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia terlantar. *Siyasah Dusturiyah* membahas hubungan pemimpin dan rakyat serta kelembagaan masyarakat agar tercipta keadilan dan perlindungan hak warga negara (Iqbal 2014, 177), dengan kebijakan negara yang harus berorientasi pada kemaslahatan umum tanpa diskriminasi (Ulul et al. 2025, 136). Pemerintah sebagai ulil amri berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan, sejalan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Meski banyak program telah dijalankan, efektivitas implementasinya di lapangan perlu ditinjau karena tidak semua lansia terjangkau, akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, wilayah sulit dijangkau, serta mekanisme pelayanan yang belum optimal, termasuk di jorong-jorong Nagari Halaban. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan lansia dalam kebijakan jaring pengamanan sosial agar cakupan layanan menjangkau lansia secara keseluruhan, tidak hanya yang telah terdata. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ditujukan menganalisis peran lembaga di Nagari Halaban dalam menangani lansia terlantar, mulai dari identifikasi hingga rehabilitasi sosial, ditinjau melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Melalui kajian ini diharapkan dapat terungkap efektivitas program yang dijalankan serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya lansia terlantar di Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, serta terbatasnya layanan sosial menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan mereka, baik dari segi kesehatan maupun kondisi psikologis. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Nagari Halaban?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka disusun tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Nagari Halaban?

1.3.2 Apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam peningkatan kesejahteraan lansia di Nagari Halaban?

1.3.3 Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Nagari Halaban?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Nagari Halaban

1.4.2 Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam peningkatan kesejahteraan lansia di Nagari Halaban

1.4.3 Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Nagari Halaban

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara Islam (*siyasah dusturiyah*), terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan peran lembaga pemerintah daerah dalam penanganan lansia terlantar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan sosial di tingkat nagari, khususnya dalam konteks pelayanan sosial bagi kelompok rentan, sinergi lintas lembaga, serta efektivitas program kesejahteraan sosial di wilayah dengan basis kekerabatan adat yang masih kuat.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan perlindungan sosial, peran organisasi kemasyarakatan Islam (Nahdlatul Ulama), serta peran nagari dalam pemberdayaan lansia, khususnya di nagari-nagari dengan karakteristik sosial dan geografis yang serupa dengan Nagari Halaban. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademik mengenai relasi antara nilai adat, nilai keagamaan, dan kebijakan negara dalam menangani persoalan lansia terlantar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas program pelayanan sosial bagi lansia terlantar, khususnya di Nagari Halaban. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi antar pihak dalam penanganan lansia terlantar.
b. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penguatan program perlindungan sosial bagi lansia, baik yang terlantar maupun yang rentan, terutama pada wilayah dengan aksesibilitas dan karakteristik geografis yang beragam seperti Nagari Halaban. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran dan pengembangan kebijakan jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan lansia secara berkelanjutan.
c. Bagi organisasi kemasyarakatan Islam (Nahdlatul Ulama) dan wali nagari Halaban, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan peran dalam mendampingi lansia terlantar, sekaligus mendorong sinergi yang lebih erat dengan program pemerintah agar penanganan lansia terlantar berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.
d. Bagi masyarakat umum dan keluarga lansia, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dan kaum dalam mencegah keterlantaran lansia, serta memberikan gambaran mengenai layanan dan bantuan sosial yang dapat diakses apabila menghadapi kondisi serupa.

1.6. Studi Literatur

Guna memperkuat skripsi ini maka penulis mengambil beberapa studi literatur yang berkaitan dengan judul yang di angkat, yaitu:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pertama, Skripsi Monalisa (2023), Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, "Peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Lansia Terlantar". Penelitian ini mengkaji bentuk pelayanan sosial yang diberikan kepada lansia terlantar melalui bantuan kebutuhan dasar dan pendampingan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial cukup efektif dalam menekan angka lansia terlantar, meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi dan kondisi sosial masyarakat, di mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua, Skripsi Mutiara, R.N. (2025), Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, *"Peran Dinas Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia Terlantar melalui Rumah Belajar Lansia di Kabupaten Tulang Bawang"*. Penelitian ini membahas strategi Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar melalui program Rumah Belajar Lansia sebagai sarana pembinaan sosial dan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut mampu meningkatkan keterampilan, partisipasi sosial, dan kondisi psikologis lansia. Namun, penelitian ini berfokus pada implementasi satu program khusus, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada keseluruhan peran Dinas Sosial dalam menangani lansia terlantar di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk aspek bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial.

Ketiga, Artikel Ilmiah Firdausi dan Ananda (2025), Universitas Riau, *"Peran Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah di Pekanbaru)"*. Penelitian ini membahas peran Dinas Sosial dalam pelayanan lansia melalui sistem panti sosial (Tresna Werdha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan terintegrasi di dalam panti mampu meningkatkan kesejahteraan fisik, sosial, dan spiritual lansia. Perbedaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan penelitian ini terletak pada fokus pelayanan berbasis panti di tingkat provinsi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelayanan dan kebijakan tingkat nagari terhadap lansia terlantar yang berada di luar panti.

Keempat, Artikel Ilmiah Ratnawati, Oktaviana (2020), Mahasiswa Universitas Tidar, *"Peran Dinas Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan LansiaTerlantar di Kota Magelang melalui Program Asistensi Sosial LansiaTerlantar (ASLUT)"*. Penelitian ini membahas bagaimana Dinas Sosial Kota Magelang menjalankan program ASLUT sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan intervensi sosial untuk mengurangi kerentanan sosial mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program ASLUT dapat membantu memperbaiki taraf kesejahteraan lansia, tetapi masih terdapat kendala di lapangan seperti keterbatasan dana dan koordinasi antarinstansi.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat serta mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak hanya berbentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam program, tindakan, maupun keputusan pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang diambil pemerintah untuk merespons persoalan publik dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Agustino 2020, 14).

Kebijakan publik terbentuk melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga

UIN IMAM BONJOL PADANG

evaluasi kebijakan. Setiap tahapan memiliki peran yang sama pentingnya karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata terhadap penyelesaian masalah publik.

Dalam penelitian ini, teori kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar. Analisis tersebut tidak hanya difokuskan pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada proses implementasi program, koordinasi antarinstansi, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Melalui teori kebijakan, peneliti dapat menilai apakah kebijakan yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal kepada lansia terlantar.

1.7.2. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar tingkat ketercapaian tujuan yang direncanakan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan pelayanan publik. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara tepat sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Hartati & Anggarini 2014, 80).

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan berbagai barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang ingin

UIN IMAM BONJOL PADANG

dicapai. Dengan kata lain, efektivitas lebih menekankan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan daripada besarnya sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, suatu program dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sejak awal.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas digunakan untuk menganalisis keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan program peningkatan kesejahteraan lansia terlantar. Tingkat efektivitas tersebut dapat dilihat dari ketercapaian tujuan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas pelayanan yang diberikan, serta dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan lansia. Dengan demikian, teori efektivitas menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan dan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.7.3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang *fiqih siyasah* yang membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat, kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bersama (Iqbal 2014, 177). Kajian ini mencakup konsep *imamah*, *khilafah*, hubungan kekuasaan, serta batasan wewenang penyelenggara negara sebagaimana termuat dalam konstitusi. Prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah meliputi *al-'adalah* (keadilan), *as-syura* (musyawarah), *al-musawah* (persamaan), dan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), yang menjadi dasar bagi setiap kebijakan negara agar berorientasi pada kepentingan seluruh warga tanpa diskriminasi (Ulul et al. 2025, 136). Dalam kerangka ini, pemerintah berkedudukan sebagai *ulil amri* yang wajib memberikan perlindungan, pelayanan sosial, dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia terlantar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perhatian terhadap kelompok yang lemah, termasuk lansia terlantar, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Pandangan ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu melihat apakah berbagai lembaga yang terlibat telah menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam *Siyasah Dusturiyah*

1.8. Metode Penelitian

John W. Creswell dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, metode penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang melibatkan langkah-langkah luas mulai dari asumsi filosofis luas seperti *postpositivisme, konstruktivisme, dan pragmatisme* hingga metode yang lebih rinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Metode penelitian mencerminkan keseluruhan proses penelitian yang sistematis untuk memahami dan menjawab permasalahan yang diteliti (Creswell 2023, 4).

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus sejauh mana peran lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan lingkungan sekitar meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, baik dari sisi pelaksanaan program, bentuk pelayanan yang diberikan, maupun hambatan dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial lansia.

1.8.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena Nagari Halaban berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang tercatat memiliki 605 kasus lansia terlantar pada tahun 2025, menempati posisi tertinggi kedua se-Kabupaten Lima Puluh Kota setelah Kecamatan Kapur IX, dan jauh di atas rata-rata jumlah kasus per kecamatan di kabupaten tersebut, dengan Nagari Halaban sebagai salah satu nagari dengan konsentrasi kasus yang cukup tinggi di kecamatan tersebut. Secara administratif, Nagari Halaban terdiri dari beberapa jorong dengan wilayah agraris yang luas, mulai dari jorong yang dekat dengan pusat pemerintahan nagari hingga yang relatif terpencil, sehingga memungkinkan peneliti melihat variasi penanganan lansia terlantar pada karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Lokasi nagari ini juga tidak jauh dari pusat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data primer serta koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Nahdlatul Ulama, dan Nagari yang terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di wilayah tersebut. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara dan observasi langsung kepada Dinas Sosial, Nahdatul Ulama dan Nagari yang terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Nagari Halaban. Teknik pengumpulan data primer yang

digunakan adalah wawancara dan observasi lapangan di Nagari Halaban.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, data statistik, maupun literatur ilmiah yang relevan. dalam memberikan layanan kepada lansia terlantar. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan mengenai perlindungan dan bantuan sosial bagi lansia yang hidup sendiri atau terlantar, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, Nahdatul Ulama dan Nagari dalam memberikan bantuan kepada lansia yang berlangsung di Nagari Halaban. Observasi ini akan memberikan gambaran tentang implementasi layanan tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan lansia.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui tatap muka dengan individu atau pihak yang memiliki kapabilitas memberikan informasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar. Wawancara ini dilakukan secara

UIN IMAM BONJOL PADANG

terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang pengaruh pelayanan terhadap lansia.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat secara langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 7 orang, yang terdiri atas 2 orang dari Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, 1 orang pengurus Nahdlatul Ulama, 1 orang dari Wali nagari Halaban, 1 orang pengurus masjid, dan 2 orang lansia terlantar yang menjadi penerima manfaat program kesejahteraan sosial. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan, pengalaman, serta pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan lansia terlantar, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang mendukung hasil wawancara dan observasi mengenai peran lembaga dalam penanganan lansia terlantar di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 65 yang mengatur pemberian bantuan sosial bagi lansia yang hidup sendiri atau terlantar. Selain itu, dokumentasi juga mencakup data jumlah lansia terlantar yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, profil instansi, laporan kegiatan, arsip program pelayanan sosial, foto-foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan lansia terlantar. Melalui teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian sekaligus melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan sehingga menghasilkan data yang lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnaya untuk mengolah data hasil penelitian menjadi satu laporan, dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan analisis data ketika pegumpulkan data berlangsung atau setelah data dkumpulkan. Analisi data dapat dilakukan dengan cara yaitu:

a. Kondensasi data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan, wawancara transkip, dokumentasi dan bahan empiris lainnya. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih kuat.

b. Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan dalam uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan atau dalam bentuk teks narasi.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalan penelitian kualitatif ialah merupakan temuan baru yang belum pernah ada yang membahas, temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang akan dijelaskan secara rinci melalui penelitian.

UIN IMAM BONJOL PADANG